

HDI DETERMINANTS: FISCAL-DRIVEN, RGDP OR LOCAL LEADER'S COMMITMENT? (EVIDENCE FROM SOUTH KALIMANTAN PROVINCE)

**Norkamila
Muhammad Hudaya**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

Email: norkamila88@gmail.com

Abstract: *Human Development Index (HDI) of South Kalimantan was ranked at 25th among 34 provinces across Indonesia in 2016 and the score achieved below the national HDI result. The purpose of this research is to determine and analyze the effect of local fiscals (represented by locally-generated revenue (PAD), revenue sharing fund, general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), personnel expenditure, goods expenditure, capital expenditure) local leader's commitment, regional gross domestic product (RGDP) and dependency ratio on HDI in the districts/cities within South Kalimantan. Population of this research are all districts/cities of South Kalimantan which consists of 13 regions in the period 2013-2016. Data analysis was conducted using double-log regression analysis. The research found that variable of locally-generated revenue and RGDP have positive effect on HDI, and variable of personnel expenditure, local leader's commitment, and dependency ratio have negative effect on HDI. These results provide insightful findings to discuss. Local leaders' commitment, for instance, did not contribute positively on HDI, it may be because their commitments are merely in the lip-service praxis.*

Keywords: *Human Development Index, South Kalimantan, Locally-Generated Revenue, Local Leader's Commitment*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. Pembangunan manusia dapat diukur dengan angka indeks pembangunan manusia atau yang sering disebut dengan IPM. Menurut (Todaro & Smith, 2011), IPM merupakan suatu indeks pengukuran pencapaian pembangunan suatu negara dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, IPM di provinsi Kalimantan Selatan masih tergolong rendah yaitu masih di bawah angka IPM nasional. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada 9 provinsi yang IPM nya di atas IPM nasional dan 25 provinsi yang IPM nya di bawah IPM nasional. Provinsi Kalimantan Selatan tergolong dalam 25 provinsi yang IPM nya masih berada di bawah angka IPM nasional (Badan Pusat

Statistik, 2017). Hal ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia dan meningkatkan indeks angka indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (2009), rendahnya IPM di kabupaten/kota Kalimantan Selatan dikarenakan peningkatan kesejahteraan yang tidak merata dan kegiatan pembangunan yang tidak tepat, sehingga menyebabkan ketimbangan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan manusia, tentunya dikenal yang namanya desentralisasi yaitu menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan untuk melakukan pembangunan manusia. Sumber pendanaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan manusia yaitu pendapatan asli daerah yang berasal dari penghasilan daerah itu sendiri seperti hasil pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Selain itu, dana perimbangan juga diperlukan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah dalam melakukan pembangunan manusia. Tujuan dari dana perimbangan ini yaitu agar kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dapat dikurangi karena untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah tidak cukup jika hanya menggunakan hasil dari pendapatan asli daerah sehingga di tetapkan mengenai dana perimbangan yang diatur dalam peraturan perundangan (Nordiawan *et al*, 2012). Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang penggunaannya di atur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2016 yaitu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan fasilitas layanan publik dan ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan penyediaan layanan antar daerah. Selain dari sumber pendanaan yang diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, belanja daerah juga diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena dengan pengeluaran pemerintah seperti belanja daerah, Pemerintah daerah akan dapat melakukan pembangunan manusia dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Belanja daerah yang diperkirakan mempengaruhi IPM yaitu berupa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja Pegawai dianggap dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, karena semakin banyak

pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah akan menjadikan IPM lebih baik lagi. Belanja barang dan belanja modal dianggap dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat karena dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang baik juga akan meningkatkan pembangunan manusia lebih baik lagi (Priambodo, 2015).

Selain dilihat dari sisi keuangan yaitu berupa pendanaan dan belanja daerah yang telah diatur mengenai perolehan dan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah. Hal lain diluar dari sisi keuangan yang diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu komitmen kepala daerah, produk domestik regional bruto, dan rasio ketergantungan. Dengan adanya komitmen kepala daerah mengenai pelaksanaan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakatnya, tentu kepala daerah akan bertanggungjawab tentang pengelolaan keuangan daerah agar lebih banyak digunakan untuk program atau kegiatan yang mengarah ke pembangunan manusia dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Produk domestik regional bruto juga diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Produk domestik regional bruto yang disebut dengan PDRB merupakan cerminan dari hasil perekonomian masyarakat di daerah. Jadi perekonomian masyarakat di daerah tersebut dapat dilihat melalui angka PDRB. Menurut Todaro & Smith (2011), PDRB merupakan nilai output hasil barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian daerah. Dengan melihat melalui nilai output hasil barang dan jasa dari kehidupan perekonomian yang terjadi di masyarakat, maka tercermin pula kondisi kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Tentunya daerah yang memiliki PDRB yang tinggi akan dapat meningkatkan IPM karena dengan PDRB yang tinggi dapat mencerminkan masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan Selatan memiliki kesejahteraan yang baik.

Rasio ketergantungan juga diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena rasio ketergantungan yang tinggi dalam masyarakat akan berdampak buruk terhadap pembangunan manusia di daerah. Besarnya ketergantungan penduduk usia yang tidak produktif terhadap penduduk usia yang produktif menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan pembangunan dan menjadikan kehidupan yang sejahtera. Sebaliknya, jika rasio ketergantungan yang ada di masyarakat itu rendah, artinya hanya sedikit penduduk usia yang tidak produktif bergantung kepada penduduk usia yang produktif. Hal tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri sebagai bentuk pembangunan manusia di daerah kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Pemerintah dibawah

pengawasan kepala daerah yang berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah, baik berupa penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibantu oleh masyarakat dengan PDRB yang tinggi dan rasio ketergantungan yang rendah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) ini adalah apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, komitmen kepala daerah, produk domestik regional bruto, dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, komitmen kepala daerah, produk domestik regional bruto, dan rasio ketergantungan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yaitu hubungan antara *principal* dan *agent*, dalam penyerahan wewenang *principal* terhadap *agent* untuk pengambilan keputusan sesuai kepentingan pihak *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan (*agency theory*) tersirat dalam hubungan masyarakat sebagai pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan kepala daerah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima wewenang (*agent*). Kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memenuhi visi misi yang sudah dijanjikannya dan pemerintah daerah memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat tentang pertumbuhan penduduk di daerah di antaranya program keluarga berencana untuk mengurangi lajunya pertumbuhan penduduk dan tanggungan beban penduduk yang berusia produktif.

Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang memiliki kepentingan masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Pemerintah daerah sebagai *agent* menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai *principal* untuk belanja keperluan pemerintahan dalam melakukan pembangunan di daerahnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang merupakan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat (Sarkoro, 2016). Selain itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan moneter dan fiskal dengan tujuan agar perekonomian di daerah dapat distabilkan dan diarahkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Teori Peacock-Wiseman

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat (Prasetya dalam Priambodo, 2015). Penerimaan pemerintah yang semakin besar menyebabkan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar, dengan begitu akan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang berdampak terhadap indeks pembangunan manusia di daerah tersebut karena daerah yang mempunyai perekonomian yang baik dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang baik pula.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan kegiatan pembangunan yang menjadikan manusia mempunyai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memiliki kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indeks pembangunan manusia atau yang disebut dengan IPM merupakan alternatif pengukuran kinerja pembangunan suatu negara atau daerah. IPM secara umum mencakup dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM secara khusus mencakup dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan angka lama sekolah, serta tingkat konsumsi per kapita (Todaro & Smith, 2011).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan pendapatan asli daerah yang terus meningkat dan penggunaan pendapatan asli daerah yang tepat

tentunya akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di suatu daerah tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena sebagian indeks pembangunan manusia diukur dari kesejahteraan masyarakatnya.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari tiga, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi khusus dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pengalokasian dana bagi hasil dan dana alokasi umum juga dijelaskan dalam UU No. 18 tahun 2016, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dialokasikan untuk percepatan pembangunan fasilitas layanan publik antara lain di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan infrastruktur, tentunya akan lebih memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan akan meningkatkan IPM di daerah.

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah yang diperkirakan mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Penggunaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013. Belanja Pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai yang dikeluarkan untuk menggaji para pelaku pembangunan manusia seperti tenaga pendidik, kesehatan, dan pegawai lain yang tentunya dapat menjadikan IPM meningkat.

Belanja Barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dianggap dapat memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pengadaan barang dan jasa dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan infrastruktur di daerah akan menjadikan IPM meningkat. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap IPM, karena dengan terpeliharanya infrastruktur yang ada dan tersedianya barang-barang yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan IPM.

Sedangkan Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal juga dianggap dapat memberikan dampak yang baik dalam menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak, seperti pembangunan jembatan, jalan, sarana transportasi yang akan melancarkan aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap IPM, karena semakin tersedianya infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat maka dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menjadikan IPM meningkat.

Komitmen Kepala Daerah

Dijelaskan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengawas kinerja pemerintahan serta menjadi pemimpin dalam melaksanakan pembangunan manusia di daerahnya.

Komitmen kepala daerah dapat dilihat melalui visi dan misi yang dijalankan selama masa jabatan kepala daerah berlangsung. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadikan sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi dan misi tersebut tertuju pada arahan dari kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan penetapan dalam RPJPD. Visi, misi, dan program kerja adalah hasil dari proses politik dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu visi misi dan program dari kepala daerah dan wakilnya dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dengan adanya kepala daerah yang berkomitmen mengenai pelaksanaan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, maka keuangan daerah untuk pembangunan manusia dapat dikelola dengan baik dan pengawasan kinerja pemerintahan dapat ditingkatkan serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah kabupaten/kota Kalimantan Selatan.

Produk Domestik Regional Bruto

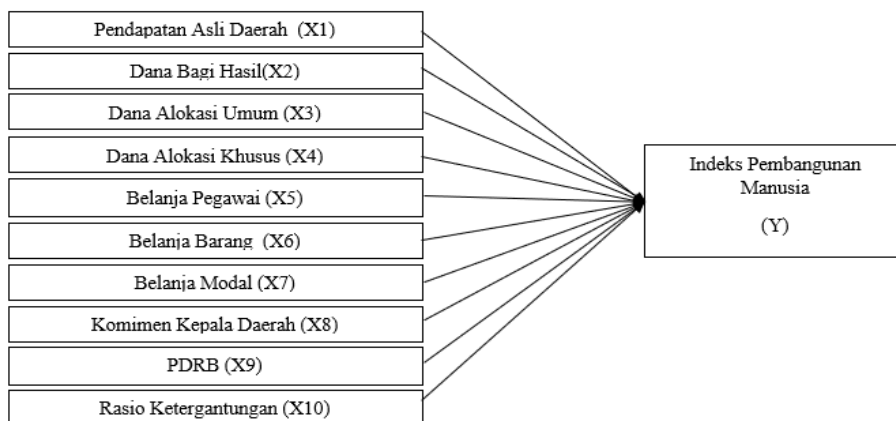
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perekonomian daerah yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Todaro & Smith (2011) menjelaskan bahwa PDRB merupakan nilai total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tentunya daerah yang memiliki PDRB yang tinggi akan dapat menjadikan IPM meningkat karena dengan PDRB yang tinggi dapat mencerminkan masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan Selatan memiliki kesejahteraan yang baik.

Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia yang tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif (Todaro & Smith, 2011). Penduduk usia produktif adalah

penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Mereka berpotensi bekerja yaitu melakukan kegiatan atau membantu melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang atau keuntungan. Penduduk usia < 15 tahun atau > 65 tahun adalah penduduk usia tak produktif dimana mereka tidak berpotensi bekerja, sehingga mereka bergantung kepada penduduk usia produktif. Perbandingan antara usia non produktif dengan usia produktif disebut dengan angka beban tanggungan atau rasio ketergantungan (Dewi, 2014). Besarnya tanggungan beban penduduk yang berusia produktif menanggung penduduk yang berusia tidak produktif dalam hal ini dapat diukur melalui rasio ketergantungan di masing-masing daerah. Tentunya dengan rasio ketergantungan yang rendah akan dapat menjadikan IPM meningkat.

Model Hipotesis



Hipotesis Penelitian

- H1. Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap IPM (Y)
- H2. Ada pengaruh Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap IPM (Y)
- H3. Ada pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap IPM (Y)
- H4. Ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap IPM (Y)
- H5. Ada pengaruh Belanja Pegawai (X_5) terhadap IPM (Y)
- H6. Ada pengaruh Belanja Barang (X_6) terhadap IPM (Y)
- H7. Ada pengaruh Belanja Modal (X_7) terhadap IPM (Y)
- H8. Ada pengaruh Komitmen Kepala Daerah (X_8) terhadap IPM (Y)
- H9. Ada pengaruh PDRB (X_9) terhadap IPM (Y)
- H10. Ada pengaruh Rasio Ketergantungan (X_{10}) terhadap IPM (Y)

METODE

Jenis Penelitian dan Populasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Populasinya yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 daerah dimana terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. Populasi sebanyak 13 Kabupaten/Kota tersebut akan dikalikan dengan empat tahun periode pengamatan. Sehingga jumlah akhir yang akan diobservasi sebanyak 52 *data pooling* yang akan diteliti seluruhnya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data indeks pembangunan manusia, data PDRB, dan data rasio ketergantungan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan. Data laporan kinerja masing-masing pemerintah daerah diperoleh dari publikasi melalui website resmi pemerintah daerah. Sedangkan data laporan realisasi anggaran diperoleh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan metode estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS). Model regresi *double-log* digunakan karena terjadi multikolonearitas pada data penelitian ini. Oleh karena teknik analisis data perlu disesuaikan dari multiple linear regression menjadi *double-log regression*, dimana kedua belah persamaan dirubah dalam bentuk logaritma natural kecuali variabel dummy (Ghozali, 2016). Model persamaan untuk regresi linier berganda dengan model regresi *double-log* yaitu sebagai berikut:

$$\text{LnIPM}_{it} = a + b_1 \text{LnPAD}_{it} + b_2 \text{LnDB}_{it} + b_3 \text{LnDAU}_{it} + b_4 \text{LnDAK}_{it} + b_5 \text{LnBP}_{it} \\ + b_6 \text{LnBB}_{it} + b_7 \text{LnBM}_{it} + b_8 \text{KKD}_{it} + b_9 \text{LnPDRB}_{it} + b_{10} \text{LnRK}_{it} + e_{it}$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

BP = Belanja Pegawai

BB = Belanja Barang

BM = Belanja Modal

KKD = Komitmen Kepala Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

RK = Rasio Ketergantungan

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

it = Kabupaten/Kota *i* pada tahun *t*

HASIL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4), Belanja Pegawai (X_5), Belanja Barang (X_6), Belanja Modal (X_7), Komitmen Kepala Daerah (X_8), PDRB (X_9), Rasio Ketergantungan (X_{10}) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Tabel 1. Hasil Uji Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,732	,526		16,602	,000
PAD	,057	,012	,472	4,887	,000
DBH	-,020	,012	-,153	-1,647	,107
DAU	-,033	,034	-,122	-,982	,332
DAK	,003	,003	,060	,925	,360
BP	-,110	,034	-,449	-3,250	,002
BB	,012	,017	,065	,717	,478
BM	,007	,012	,038	,617	,541
KKD	-,033	,007	-,239	-4,819	,000
PDRB	,035	,011	,328	3,136	,003
RK	-,820	,078	-,700	-10,473	,000

Hasil Uji:

Berdasarkan output SPSS uji regresi linier berganda pada tabel *Coefficient* kelompok sig: Nilai Sig:

- Pendapatan Asli Daerah (X_1), $P_{\text{Value}} (0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- Dana Bagi Hasil (X_2), $P_{\text{Value}} (0,107) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Dana Alokasi Umum (X_3), $P_{\text{Value}} (0,332) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Dana Alokasi Khusus (X_4), $P_{\text{Value}} (0,360) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Belanja Pegawai (X_5), $P_{\text{Value}} (0,002) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- Belanja Barang (X_6), $P_{\text{Value}} (0,478) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Belanja Modal (X_7), $P_{\text{Value}} (0,541) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Komitmen Kepala Daerah (X_8), $P_{\text{Value}} (0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- PDRB (X_9), $P_{\text{Value}} (0,003) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- Rasio Ketergantungan (X_{10}), $P_{\text{Value}} (0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak

Dari berbagai faktor yang diuji, ada lima variabel yang memiliki pengaruh signifikan kepada Indeks Pembangunan Manusia. Dua variabel yang berpengaruh positif yaitu variabel pendapatan asli daerah yang mempunyai nilai t-hitung $4,887 > t\text{-tabel } 2,018$ dan variabel PDRB yang mempunyai nilai t-hitung $3,136 > t\text{-tabel } 2,018$. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif ada tiga, yaitu variabel belanja pegawai yang mempunyai nilai t-hitung $-3,250 < t\text{-tabel } 2,018$, variabel komitmen kepala daerah yang mempunyai nilai t-hitung $-4,819 < t\text{-tabel } 2,018$, dan

variabel rasio ketergantungan yang mempunyai nilai $t\text{-hitung} = -10,473 < t\text{-tabel} = 2,018$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ini searah dan signifikan dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengelola pendapatan asli daerahnya untuk pembangunan di daerah, sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarkoro (2016) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Selain itu, penggunaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan memang untuk pelaksanaan pembangunan yang merupakan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap IPM

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menggunakan dana bagi hasil untuk keperluan daerah yang mungkin tidak berdampak ke pembangunan manusia di daerah tersebut sehingga tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2014) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak searah dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena ketidakmerataan dana bagi hasil yang diperoleh pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan juga karena penggunaan dana bagi hasil lebih banyak untuk keperluan daerah yang tidak memberikan dampak ke pembangunan manusia di daerah. Sehingga menyebabkan

dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan karena pengalokasian dana alokasi umum lebih digunakan untuk keperluan daerah yang lain sehingga tidak berdampak terhadap indeks pembangunan manusia. Meskipun dana alokasi umum dialokasikan untuk belanja pegawai yang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tetapi, selain digunakan untuk belanja pegawai, dana alokasi umum juga digunakan untuk keperluan daerah yang tidak berdampak terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga menyebabkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak searah dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena jumlah dana alokasi khusus kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang masih sedikit dengan kegiatan dana alokasi khusus yang banyak. Selain itu, juga karena penggunaan dana alokasi khusus yang lebih dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berarti pembangunan fisiknya sedangkan dalam pembangunan manusia juga diperlukan peningkatan kualitasnya. Sehingga menyebabkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia karena belanja pegawai itu digunakan untuk gaji para tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pegawai lain sebagai pelaku pembangunan manusia. Tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ini berpengaruh negatif yang artinya signifikan tetapi tidak searah dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat diartikan bahwa banyaknya jumlah yang dikeluarkan untuk belanja pegawai masih belum bisa menjadikan indeks pembangunan manusia tinggi. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

mengeluarkan dana yang banyak untuk belanja pegawai tetapi indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Kalimantan Selatan masih rendah.

Pengaruh Belanja Barang terhadap IPM

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja barang tidak berpengaruh yang artinya variabel ini tidak searah dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan belanja barang kabupaten/kota di Kalimantan Selatan digunakan untuk keperluan yang tidak berdampak terhadap pembangunan manusianya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryati (2015) menunjukkan bahwa belanja barang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Penggunaan belanja barang lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan operasional pemerintah, seperti belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas, belanja perlengkapan dan peralatan kantor, serta belanja lainnya. Meskipun ada sebagian belanja barang yang digunakan untuk belanja pemeliharaan jalan, belanja hibah dan bantuan untuk masyarakat lainnya. Tetapi, tidak berdampak terhadap pembangunan manusia sehingga belanja barang pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak searah dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih banyak untuk keperluan yang tidak berdampak terhadap pembangunan manusia, seperti belanja modal pengadaan peralatan kantor, pengadaan bangunan gedung tempat kerja dan tempat tinggal baru, serta belanja yang lain. Hal ini berarti belanja modal pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan digunakan untuk kegiatan yang kurang berkaitan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ini berpengaruh negatif yang artinya signifikan tetapi tidak searah dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat diartikan bahwa banyaknya kepala daerah yang telah berkomitmen tentang

pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat untuk daerahnya masih belum bisa menjadikan indeks pembangunan manusia tinggi. Dengan kata lain, kepala daerah atau pemimpin Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sudah banyak yang berkomitmen tentang pembangunan manusia yang tercantum dalam visi misinya tetapi indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Kalimantan Selatan masih rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia karena dengan adanya komitmen kepala daerah dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah untuk pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat dikelola dengan baik serta menjadikan pelaksanaan pengawasan atas kinerja pemerintah daerah sebagai pelaku dari pembangunan manusia itu sendiri dapat ditingkatkan. Tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh negatif yaitu hal yang kontradiktif dengan teori, hal ini bisa jadi karena komitmen kepala daerah masih dalam tataran *lip-service* (lebih dominan janji dan jargon semata) dimana komitmen tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan melalui perangkat fiskal daerah (APBD) dan sumber daya lain yang dimiliki.

Pengaruh PDRB terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bhakti (2012) yang menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena dengan produk domestik regional bruto yang tinggi dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang sebagian diukur dari kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi, pada kenyataannya produk domestik regional bruto pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih rendah. Hal inilah yang menyebabkan indeks pembangunan manusia masih rendah.

Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap IPM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ini berpengaruh negatif yang artinya signifikan tetapi tidak searah dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya tingkat rasio ketergantungan menjadikan indeks pembangunan manusia rendah. Dengan kata lain, besarnya tanggungan masyarakat yang berusia produktif untuk menanggung masyarakat yang berusia tidak produktif pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

menyebabkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Kalimantan Selatan masih rendah.

Todaro dan Smith (2011) mengungkapkan bahwa rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia yang tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Di mana dalam suatu daerah pasti terdapat masyarakat yang berusia tidak produktif dan belum dapat bekerja, sehingga masyarakat yang berusia produktif berkewajiban menanggung beban penduduk yang berusia tidak produktif ini. Hal ini terjadi pada masyarakat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki angka rasio ketergantungan cukup tinggi dan menyebabkan pembangunan manusia di daerah rendah karena banyaknya tanggungan yang ditanggung oleh masyarakat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota Kalimantan Selatan yaitu pendapatan asli daerah dan PDRB. Adapun variabel independen yang berpengaruh negatif terhadap IPM di kabupaten/kota Kalimantan Selatan yaitu belanja pegawai, komitmen kepala daerah, dan rasio ketergantungan. Sedangkan variabel independen yang lain seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Kalimantan Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang mencakup tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten/kota dengan menggali potensi daerah lebih banyak lagi dan juga mengelola penerimaan khususnya dana perimbangan yang jumlahnya cukup besar serta menggunakan anggaran belanja khususnya belanja barang dan belanja modal untuk dialokasikan lebih banyak lagi pada kegiatan/program yang mengarah ke peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Selain itu, bagi para calon pemimpin yang ingin menjadi kepala daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berkomitmen dan merealisasikannya untuk terus menerus melakukan pembangunan manusia di daerah tersebut. Diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri supaya menjadikan daerahnya lebih berkembang dan ikut serta dalam melakukan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ide/gagasan yang baru dengan menambah variabel independen lain yang lebih bervariasi dan tidak terdapat dalam model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2009. *Penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Balitbangda Prov. Kalsel.
- Badan Pusat Statistik. (2017, desember 8). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2016. hal. (<http://www.kalsel.bps.go.id>).
- Bhakti, N. A. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 452-469
- Damayanti, M. I. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012
- Dewi, S. (2014, April 5). Rasio Ketergantungan Analisa Untuk Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta*, hal. 1-7.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (3 ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
- Priambodo, A. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Universitas Brawijaya Malang*, 1-14.
- Sarkoro, H. 2016. Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-19.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah.